

## PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI PEMODERASI PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN WHISTLE BLOWING SYSTEM TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD

Nabila Nurul Aziza<sup>1</sup> ; Dwi Irawan<sup>2</sup> ; Agung Prasetyo Nugroho Wicaksono<sup>3</sup> ; Ihyaul Ulum<sup>4</sup>  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang<sup>1,2,3,4</sup>  
Email : nabilanurulaziza11@gmail.com<sup>1</sup>; irawan@umm.ac.id<sup>2</sup>; agungpnw@umm.ac.id<sup>3</sup>;  
ihyaul@umm.ac.id<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian pada Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan memiliki tujuan untuk mengevaluasi dampak keterlibatan masyarakat dalam memitigasi dampak negatif budaya organisasi dan sistem pelaporan pelanggaran terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Metodologi yang digunakan adalah dengan memasukkan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderasi. Pendekatan asosiatif dan metode penelitian kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner ke 8 desa di Kecamatan Sukorejo. Pendekatan analisis data menggunakan metodologi Structural Equation Model (SEM) dengan menggunakan perangkat lunak SmartPLS 3. Perangkat lunak ini memungkinkan pengujian model pengukuran dan model struktural secara bersamaan. Data primer dari survei dan data sekunder dari penelitian sebelumnya merupakan dua jenis sumber data yang digunakan.. Temuan penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki dampak yang baik, sedangkan sistem whistleblower tidak memiliki dampak yang nyata. Temuan ini juga menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan dampak budaya organisasi dan mekanisme *whistleblower*. Hal ini menunjukkan adanya korelasi langsung antara kualitas budaya organisasi dan mekanisme whistleblowing dengan efektivitas pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.

Kata Kunci : Budaya Organisasi; Dana Desa; Fraud; Partisipasi Masyarakat; Whistleblowing System

### ABSTRACT

*Research in Sukorejo District, Pasuruan Regency has the aim of highlighting the impact of community involvement in mitigating the negative impact of organizational culture and the violation reporting system on preventing violations in village financial management. The methodology used is to include community participation as a moderating variable. An associative approach and quantitative research methods were used in this research. The data collection method was carried out by distributing questionnaires to 8 villages in Sukorejo District. The data analysis approach uses the Structural Equation Model (SEM) methodology using SmartPLS 3 software. This software allows testing measurement models and structural models simultaneously. Primary data from surveys and secondary data from previous research are the two types of data sources used. Research findings show that organizational culture has a good impact, while the whistleblower system does not have a real impact. These findings also show that community involvement can increase the impact on organizational culture and whistleblower mechanisms. This shows that there is a direct correlation between the quality of organizational culture and whistleblowing mechanisms and the effectiveness of fraud prevention in managing village funds.*

*Keywords : Organizational Culture; Village Fund; Fraud; Society participation; Whistleblowing System*

## PENDAHULUAN

Desa-desanya di Indonesia mempunyai kebebasan untuk mengelola pemerintahan dan urusan kemasyarakatan mereka sendiri, dan kepentingan lokal berasal dari upaya masyarakat yang diakui dan dihargai oleh struktur pemerintahan. Dedikasi pemerintah pusat untuk memperjelas peran dan yurisdiksi desa serta meningkatkan status desa dicapai melalui implementasi UU No. 6/2014 tentang Desa. Pemerintah Indonesia memfasilitasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan keuangan, yang umumnya dikenal sebagai subsidi desa. Administrasi dan pengawasan dana desa diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang diterbitkan tanpa tanggal yang pasti. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan PP No. 60 tahun 2014, beberapa langkah telah dilakukan. Salah satu langkah Hal ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan Masyarakat di desa, yaitu pengalokasian dana yang bersumber dari APBN (Wahyudi et al., 2021).

Terjadinya penyelewengan anggaran yang bersumber dari dana APBN di organisasi pemerintah Indonesia sebagian besar disebabkan oleh kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana tersebut, terutama dalam tata kelola keuangan desa. Indonesia Corruption Watch (ICW) secara terus menerus melaporkan bahwa korupsi di tingkat desa selalu menduduki peringkat teratas dalam hal jumlah kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum pada tahun 2015 hingga 2021. Selama tujuh tahun, sebanyak 592 kasus korupsi terjadi di desa dengan nilai kerugian negara mencapai Rp433,8 miliar (icw.com). Hal ini menunjukkan bahwa fraud yang sering terjadi di sektor publik banyak terjadi. Sumbangan atau dana yang seharusnya diterima masyarakat tidak sesuai dengan anggaran yang diajukan. Banyaknya kasus pemotongan bantuan kepada rakyat merupakan suatu hal yang sangat memprihatinkan bagi masyarakat.

Praktik-praktik yang tidak tepat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangat rentan terjadi akibat kualitas aparatur pemerintah serta lemahnya pengawasan (Fitriyani et al., 2018) Dalam dunia perangkat daerah kerap kali terjadi fraud-fraud yang terjadi dalam bidang akuntansi. Fraud yang sering terjadi dalam sektor akuntansi publik biasanya berupa manipulasi atau penipuan dalam melaporkan data keuangan maupun non-keuangan (Ruing, 2023). Fenomena yang dikenal sebagai fraud dalam pelaporan

keuangan atau *fraud* adalah ketika informasi keuangan disajikan dengan salah saji yang disengaja untuk mengelabui pihak yang menggunakan keuangan (Arum & Wahyudi, 2020)

Salah satu strategi pencegahan fraud akuntansi adalah dengan memperkuat sistem pelaporan pelanggaran atau dalam dunia akuntansi dikenal dengan istilah whistleblowing system, untuk pelaporan pelanggaran di setiap institusi pemerintah (Schultz & Harutyunyan, 2015). Whistleblowing adalah pengungkapan perilaku yang melanggar hukum, tidak etis, atau merugikan yang dilakukan oleh pegawai atau pemimpin suatu organisasi yang berpotensi merugikan organisasi atau pemangku kepentingannya. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa sistem whistleblowing adalah metode yang efisien untuk melaporkan pelanggaran dalam suatu organisasi (Castellani & Nuralisa, 2022; Nurhidayat & Kusumasari, 2018).

Sistem whistleblowing merupakan media bagi pelapor (*whistleblower*) untuk melaporkan *fraud* dalam suatu instansi (Mahdi & Darwis, 2020). Rangkaian tindakan *fraud* akuntansi yang dilakukan oleh pihak pengelola keuangan desa dapat dicegah oleh masyarakat tanpa cemas jika karena keamanan data pelapor terjamin (Musmulyadi & Sari, 2020)

Strategi lain yang dapat mencegah terjadinya fraud adalah adanya budaya etis organisasi. Budaya organisasi merupakan suatu ciri khas yang ada dalam suatu organisasi dan digunakan untuk membedakannya dengan organisasi lain. Budaya organisasi mendukung anggapan bahwa iklim etika dapat menginspirasi seseorang untuk mengungkapkan kejahatan apapun (Nuswantara et al., 2022). Jadi, berdasarkan teori dan temuan penelitian sebelumnya, dapat diprediksi bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Karyawan akan lebih bersedia untuk mengajukan keluhan penipuan jika budaya organisasinya positif dan sehat.

Penelitian ini menambah penelitian (Nurjanah & Setiawan, 2021) mengenai potensi kecurangan akuntansi pada pemerintahan desa serta hubungan antara budaya organisasi, moralitas individu, dan pengendalian internal. Investigasi sebelumnya menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara perilaku curang dan budaya perusahaan. Dampak pengendalian internal, protokol *whistleblowing*, dan kepatuhan pelaporan keuangan terhadap pencegahan penipuan diteliti oleh (Kivaayatul Akhyaar et al., 2022). Hasil Penelitian menunjukkan pentingnya *whistleblowing* dalam mengakhiri aktivitas

kecurangan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dengan memasukkan partisipasi masyarakat sebagai faktor moderasi, sebuah variabel yang belum pernah dieksplorasi dalam penelitian lain. Keterlibatan masyarakat merupakan faktor penentu yang berdampak pada pencegahan kegiatan fraud dalam pengelolaan pendapatan desa. Peningkatan keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan fungsi pengawasan, sehingga dapat mengurangi praktik fraud dalam penyelenggaraan keuangan desa. Upaya penelitian ini untuk menyelidiki secara eksperimental pengaruh budaya organisasi dan prosedur whistleblowing terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa, dengan mempertimbangkan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderasi.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Teori Fraud Triangle

Fraud Triangle Theory yang dijelaskan Donald R. Cressey (1953) tersebut menjelaskan tentang tiga faktor dari *fraud* yaitu adanya *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization* yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak fraud. Stimulus yang memotivasi seseorang untuk melakukan kecurangan adalah tekanan. Kesempatan adalah faktor eksternal yang mendukung keadaan tertentu dalam individu atau organisasi. Misalnya, lemahnya pengendalian internal dapat menyebabkan karyawan melakukan fraud. Selain itu, kemungkinan etika dapat muncul dari ambiguitas dan aturan yang diterapkan dalam suatu organisasi, sehingga memberikan peluang bagi pelanggar untuk melakukan kesalahan. Rasionalisasi memberikan kesan kepada pelaku bahwa apa yang dilakukannya benar secara moral. (Soemarso, 2018).

### Teori Stewardship

Donaldson dan Davis (1991) mengartikulasikan tesis penatalayanan (*stewardship thesis*), yang menyatakan bahwa manajemen dipandu oleh tujuan-tujuan menyeluruh dari sebuah organisasi daripada pilihan-pilihan individu. Teori ini menganjurkan penerapan prinsip-prinsip akuntansi di sektor pemerintah. Teori ini menekankan pentingnya menyediakan informasi yang akurat dan relevan untuk memfasilitasi hubungan antara steward (pejabat pemerintah) dan principal (masyarakat).

Hubungan teori ini dengan partisipasi masyarakat sebagai Salah satu unsur yang mempengaruhi kemampuan penyelenggaraan dana desa dalam memerangi kecenderungan penyelewengan adalah kepala desa sebagai pemimpin desa (steward) dianggap sebagai pemangku amanah dari masyarakat (principal) harus selalu

memprioritaskan pengelolaan dana desa untuk kepentingan masyarakat serta pembangunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa kepada masyarakat.

### **Hipotesis Penelitian**

#### **Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Pencegahan *Fraud* Akuntansi**

Teori *fraud triangle* relevan untuk menjelaskan budaya suatu organisasi yang baik dapat mencegah terjadinya *fraud*. Teori ini menjelaskan bahwa *fraud* dapat terjadi dengan adanya tekanan, kesempatan, serta rasionalisasi.

Sementara itu, budaya organisasi adalah cara seseorang merespons kondisi dalam suatu masalah (Tutu et al., 2022). Misalnya, di dalam organisasi pemerintah, ketika seseorang terlibat dalam aktivitas *fraud*, hal tersebut dianggap sebagai hal yang normal atau rasionalisasi. Akibatnya, karyawan lain cenderung mengikuti dan melakukan tindakan *fraud* karena adanya pembenaran yang ada di dalam organisasi (Fazli et al., 2023). Sederhananya, ketika nilai-nilai etika tertanam kuat di dalam sebuah lembaga pemerintah dan *fraud* dianggap sebagai perilaku yang tidak etis, maka kemungkinan besar anggota lainnya akan menahan diri untuk tidak terlibat dalam kegiatan *fraud*. Hal ini, pada gilirannya, dapat mengurangi kebutuhan akan upaya yang ekstensif dalam mencegah *fraud*. Budaya organisasi mengacu pada budaya dalam suatu organisasi yang mencakup konsep budaya sebagai alat penghubung dan mencakup sistem kontrol atas perilaku formal dan informal. Sistem ini bertujuan untuk mempromosikan budaya etis dalam organisasi (Suh, J.B et al., 2018).

Studi yang dilakukan oleh (Fazli et al., 2023; Masni & Sari, 2023; Rodiah et al., 2019) menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud*. Akibatnya, peningkatan budaya organisasi akan menyebabkan penurunan efisiensi pencegahan *fraud*. Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**$H_1$ : Budaya Organisasi berpengaruh secara negatif terhadap Pencegahan *Fraud***

#### **Pengaruh Whistle Blowing System terhadap Pencegahan *Fraud* Akuntansi**

*Whistleblowing* adalah metode pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan sesama aparat untuk mencegah individu yang bertanggung jawab mengelola dana desa terlibat dalam kegiatan yang curang. Menerapkan sistem pelaporan pelanggaran dapat meningkatkan pengawasan dana desa, karena hanya mengandalkan pengawasan internal

di dalam organisasi saja tidak cukup untuk mencegah terjadinya fraud. Mengingat dana desa ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, maka sistem whistleblowing berfungsi sebagai tindakan pencegahan terhadap fraud (Cahyadi & Sujana, 2020). Menurut (Jayanti & Suardana, 2019) whistleblowing adalah salah satu upaya yang dapat menanggulangi kemungkinan adanya fraud dengan melakukan pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi Keterkaitan dari *whistleblowing* dengan teori *fraud triangle* adalah jika terdapat aturan terkait sistem pelaporan pelanggaran dan perlindungan terhadap *whistleblower* di desa maka sekalipun pegawai akan melakukan fraud atas dasar tekanan dan kesempatan, hal tersebut bisa dicegah karena tidak ada rasionalisasi dari *whistleblower*. Disimpulkan jika *whistleblowing system* diperkuat maka upaya dalam pencegahan fraud makin berkurang.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Olivia & Lastanti (2022), Utari dkk. (2019), dan Widyawati dkk. (2019), ditemukan bahwa penerapan whistleblowing system memiliki pengaruh terhadap pencegahan tindak fraud. Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

***H<sub>2</sub>*: Whistle Blowing System berpengaruh negatif terhadap Pencegahan Fraud Partisipasi Masyarakat sebagai Pemoderasi pengaruh Negatif Budaya Organisasi dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud**

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif individu atau kelompok sosial dalam suatu komunitas dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka (Arta & Rasmini, 2019). Keterlibatan masyarakat tidak hanya pada tahap perencanaan dan pemantauan, tetapi juga mencakup pelaksanaan, penerimaan, dan pemanfaatan hasil (Susilowati et al., 2018). Teori *stewardship* relevan untuk menjelaskan hubungan partisipasi masyarakat sebagai pemoderasi budaya organisasi dan *whistleblowing system* karena dengan adanya keterlibatan dalam perencanaan, pemanfaatan hasil pembangunan, serta pengawasan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya *fraud* maka hal tersebut menurunkan pencegahan terhadap *fraud*.

***H<sub>3</sub>*: Partisipasi Masyarakat memperkuat Pengaruh Negatif Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Fraud**

***H<sub>4</sub>*: Partisipasi Masyarakat memperkuat Pengaruh Negatif Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud**

## METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229). Pendekatan asosiatif dan metode penelitian kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Menyelidiki korelasi antar variabel dalam penelitian dapat difasilitasi dengan menggunakan metode asosiatif. Metode yang baik untuk menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih adalah penelitian kuantitatif asosiatif. Dengan menggunakan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderasi, penelitian ini melihat hubungan antara budaya organisasi dan sistem pelaporan pelanggaran. Skala Likert yang memiliki nilai berkisar antara 1 sampai 7 digunakan untuk evaluasi dalam penelitian ini. Sumber data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data mengenai budaya organisasi, kebijakan whistleblower, keterlibatan masyarakat, dan pencegahan kecurangan dana desa dikumpulkan melalui kuesioner. Selain itu, data tambahan juga digunakan, yang mencakup informasi yang diperoleh dari investigasi sebelumnya. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden, yaitu aparat pemerintah desa, kepala dusun, dan tokoh masyarakat yang menjadi perwakilan masyarakat di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan. Sebanyak 92 kuesioner telah disebarkan di 8 komunitas. Pengujian hipotesis digunakan sebagai strategi analisis data dalam penelitian ini. Meminta bantuan untuk melakukan analisis Partial Least Squares (PLS) dengan menggunakan perangkat lunak SmartPLS 3.0. Para peneliti memilih SEM-PLS sebagai metode analisis data karena memungkinkan mereka untuk secara simultan menguji model penelitian yang rumit yang melibatkan faktor eksogen, variabel endogen, dan variabel moderasi. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengestimasi model secara akurat dan benar sambil mengevaluasi teori.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Uji validitas konvergen

#### AVE

Lihat tabel 1 pada gambar dan tabel. Diketahui bahwa AVE setiap variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai validitas diskriminan masing-masing variabel adalah baik.

### **Outer Loading**

Dilihat pada tabel 2 tabel dan gambar, setelah dilakukan pengolahan data awal yang melibatkan variabel Budaya Organisasi, diketahui bahwa terdapat dua instrumen, yaitu BO3 dan BO5, yang dianggap tidak valid karena nilainya di bawah 0,7. Variabel Partisipasi Masyarakat dicirikan oleh tiga instrumen (PM2, PM3, dan PM4) yang memiliki nilai tidak valid ( $<0,7$ ). Variabel Sistem Pelaporan Pelanggaran memiliki dua instrumen, yaitu WBS1 dan WBS4, yang memiliki nilai kurang dari 0,7, sehingga tidak valid. Oleh karena itu, model perlu mengeluarkan nilai outer loading yang kurang dari 0,7.

Berdasarkan olah data kedua pada tabel 3 dengan variabel Budaya Organisasi semua instrument valid ( $<0,7$ ). Variabel Partisipasi Organisasi semua instrument valid ( $<0,7$ ). Variabel Whistleblowing System terdapat 1 instrumen yang tidak valid ( $<0,7$ ) yaitu WBS3.

Nilai instrumen pada Tabel 4 memenuhi syarat yaitu lebih tinggi dari 0,7 setelah sejumlah instrumen yang tidak valid dieliminasi. Berdasarkan hasil pengolahan data tahap ketiga. Setelah uji validitas konvergen selesai dilakukan, peneliti melanjutkan dengan melakukan uji validitas diskriminan.

### **Uji Validitas Diskriminan**

#### **Fornell-Larcker Criterion**

Temuan dari tabel 5 menunjukkan bahwa setiap konstruk menunjukkan nilai yang lebih tinggi daripada hubungannya dengan faktor lain. Nilai AVE adalah 0.77, dan Akar AVE adalah 0.87. Nilai 0.87 melampaui korelasi dengan konstruk lainnya, termasuk X2 dengan nilai 0.64, Y dengan nilai 0.64, dan Z dengan nilai -0.27.

#### **Heteroit-Monotrait Ratio (HTMT)**

Dari tabel nilai outer loading pada tabel 6 semua HTMT  $<0,9$  maka dapat dinyatakan bahwa seluruh konstruk telah valid secara validitas diskriminan.

#### **Uji Reabilitas(construct reliability)**

Bedasarkan tabel 7, dapat dinyatakan bahwa keandalan baik. Ini dikarenakan *composite reability*  $>0,7$

### **Uji Inner Model**

#### **Path Coeffisien**

Bedasarkan tabel 8 di bagian tabel dan gambar, instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur sejauh mana efek yang diberikan oleh satu variabel terhadap variabel lainnya. Hal ini dapat diamati dengan mempertimbangkan tingkat relevansi. Koefisien jalur, seperti yang didefinisikan oleh Ghozali dan Latan (2015: 80), berada di antara kisaran 1 hingga -1. Kekuatan asosiasi ditentukan oleh seberapa dekat koefisien tersebut dengan 1 atau -1.

### **R-Square**

*R Square Adjusted* pada tabel 9 memiliki nilai  $R^2$  sebesar 0,84. Hal ini menunjukkan bahwa 84% dampak terhadap pencegahan *fraud* disebabkan oleh faktor independent dari penelitian ini

### **F-Square**

Variabel interaksi budaya organisasi dengan partisipasi masyarakat (moderating effect 1) mempunyai pengaruh yang besar terhadap pencegahan *fraud* dana desa yaitu sebesar 0,636. Interaksi variabel whistleblowing system dengan partisipasi Masyarakat (moderating effect 2) mempunyai pengaruh terhadap pencegahan *fraud* dana desa sebesar 0,334. Variabel whistleblowing system. Variabel partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang kecil terhadap pencegahan fraud yakni sebesar 0,002

### **Hasil Uji Hipotesis**

#### **Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa**

Koefisien korelasi antara budaya organisasi dan pencegahan fraud adalah 0,86. Nilai t-statistik yang dihitung adalah 5,88, yang melampaui nilai batas 1,96. Nilai p-value adalah 0,00, menunjukkan signifikansi statistik di bawah tingkat signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan fraud adalah positif dan signifikan secara statistik. Oleh karena itu, hipotesis 1 (H1) tidak teruji kebenarannya.

Temuan penelitian ini bertentangan dengan pernyataan yang dibuat oleh (Fazli et al., 2023; Masni & Sari, 2023; Rodiah et al., 2019) yang mengklaim bahwa budaya perusahaan memiliki dampak negatif dalam upaya menghentikan kecurangan dana desa. Budaya organisasi yang dicirikan oleh tata kelola yang efektif memiliki kapasitas untuk menggagalkan kegiatan fraud. Jika dikaitkan dengan teori *triangle* maka budaya organisasi yang baik dengan indikator saling mengkomunikasikan tujuan antar aparatur, transparan dalam pengelolaan keuangan, dan memiliki sanksi dalam menghadapi

tindakan yang tidak etis memperkuat terjadinya pencegahan fraud karena kesempatan, peluang, dan rasionalisasi.

### **Pengaruh Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa**

Pencegahan penipuan dan sistem pelaporan pelanggaran memiliki koefisien korelasi negatif sebesar  $-0,30$ . Nilai t-statistik yang dihasilkan sebesar  $1,44$  menunjukkan bahwa proses pencegahan penipuan terkena dampak negatif dari mekanisme whistleblowing.. Namun demikian, nilai p-value sebesar  $0,15$  di atas batas signifikansi  $0,050$ , menunjukkan bahwa dampak ini tidak memiliki signifikansi secara statistik. Dengan demikian, hipotesis 2 (H2) dikonfirmasi.

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian (Olivia & Lastanti, 2022; Utari et al., 2019; Widyawati et al., 2019) yang menyatakan jika *whistleblowing system* berpengaruh negatif terhadap pencegahan fraud. Artinya jika Implementasi sistem whistleblowing yang semakin meningkat maka terjadinya *fraud triangle* semakin kecil karena adanya perlindungan yang baik kepada whistleblower yang mana pencegahan fraud yang dilakukan semakin berkurang. Maka dalam penelitian ini menunjukkan jika adanya *whistleblowing system* berpengaruh mencegah *fraud* akibat tekanan, peluang, dan rasionalisasi

### **Partisipasi Masyarakat sebagai Moderasi Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa**

Koefisien korelasi antara variabel moderasi budaya organisasi dan partisipasi masyarakat (X1.Z) dengan pencegahan fraud adalah sebesar  $0,63$ . Nilai t hitung sebesar  $3,88$  menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel interaksi (X1.Z) antara budaya organisasi dan partisipasi masyarakat terhadap pencegahan fraud. Nilai p-value sebesar  $0,000$ , yang lebih kecil dari tingkat signifikansi  $0,050$ , memberikan bukti tambahan untuk mengkonfirmasi sifat positif dan signifikan secara statistik dari pengaruh ini. Oleh karena itu, hipotesis 3 (H3) tidak terbukti. Artinya partisipasi masyarakat memperkuat variabel budaya organisasi dalam meningkatkan pencegahan *fraud*.

Maka hasil ini tidak mendukung hasil penelitian (Selvia & Arza, 2023; Yanto & Aqfir, 2021) bahwa partisipasi masyarakat, baik perencanaan maupun pelaksanaan, mengurangi kecenderungan curang dalam mengelola dana desa tapi malah sebaliknya

hal tersebut memperkuat variabel budaya organisasi dalam pengaruh positif terhadap *pengecahan fraud*. Hasil penelitian juga tidak mendukung teori *stewardship* yang menyatakan jika partisipasi masyarakat menjadi penilaian kinerja pemerintah dapat mempengaruhi negative penurunan *pengecahan fraud*.

### **Partisipasi Masyarakat sebagai Moderasi Pengaruh Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa**

Koefisien korelasi antara variabel moderasi *whistleblowing system* dan partisipasi masyarakat (X2.Z) dengan *pengecahan fraud* sebesar -0,05. Nilai kritis sebesar 1,96 terlampaui oleh nilai t hitung sebesar 2,31. Selanjutnya, kriteria signifikansi sebesar 0,05 terlampaui oleh nilai p sebesar 0,02. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel keterlibatan komunitas dan interaksi sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) X2.Z terhadap *pengecahan kecurangan* adalah signifikan secara statistik. Dengan demikian, hipotesis 4 (H4) teruji kebenarannya, yang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan penurunan *pengecahan fraud*.

Hasil juga menunjukkan kesesuaian dengan *stewardship theory* jika partisipasi masyarakat seperti pengawasan terhadap aparatur serta Pembangunan desa membantu memperkuat *whistleblowing system* pada pemerintah desa, yang mana hal tersebut mengurangi *pengecahan fraud* yang harus dilakukan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Selvia & Arza, 2023; Yanto & Aqfir, 2021) menyatakan Partisipasi masyarakat merupakan hak masyarakat untuk berpartisipasi atau ikut serta secara langsung dalam setiap kegiatan perencanaan dan pembangunan sehingga mempunyai dampak penting terhadap keberhasilan *pengecahan fraud*.

### **KESIMPULAN**

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama yaitu budaya organisasi tidak secara efektif mencegah *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Fazli dkk. (2019), Masni dan Sari (2019), dan Rodiah dkk. (2019) memberikan bukti bahwa budaya organisasi memiliki dampak negatif yang substansial terhadap *pengecahan fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hipotesis kedua menyatakan bahwa sistem pelaporan pelanggaran memiliki dampak negatif yang substansial terhadap *pengecahan fraud*. Argumen ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Olivia & Lastanti (2022), Utari dkk. (2019), dan Widyawati dkk. (2019), yang

semuanya menyatakan bahwa penerapan sistem pelaporan pelanggaran memiliki dampak negatif terhadap pencegahan fraud.

Sebaliknya, hipotesis ketiga dan keempat mengusulkan bahwa keterlibatan masyarakat meningkatkan budaya organisasi, yang mengarah pada tingkat pencegahan fraud yang lebih tinggi dalam pengelolaan keuangan dana desa melalui penerapan mekanisme whistleblowing. Hal ini dimaksudkan agar temuan penelitian dapat menunjukkan variasi di antara responden di desa-desa yang berbeda. Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat memperluas cakupan investigasi dan memasukkan variabel independen tambahan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arum, E. D. P., & Wahyudi, I. (2020). Fraudulent Financial Reporting Detection in Banking Sector: Evidence from Indonesia. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 199–211.
- Castellani, J., & Nuralisa, A. (2022). the Influence of Internal Audit and Whistleblowing System Effectiveness on Fraud Prevention. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 14(2). <https://doi.org/10.23969/jrak.v14i2.6011>
- Fazli, M., Ratnawati, V., & Nasir, A. (2023). Pengaruh Asimetri Informasi, Budaya Organisasi dan Implementasi Good Governance terhadap Kecurangan Akuntansi. *Owner*, 7(2), 1237–1248. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1345>
- Fitriyani, L. Y., Marita, M., Widyastuti, W., & Nurahman, R. W. (2018). Determinants of Village Fund Allocation. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3), 526–539. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9031>
- Jayanti, L. S. I. D., & Suardana, K. A. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas, Whistleblowing dan SPI Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(3), 1117. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i03.p16>
- Kivaayatul Akhyaar, Anissa Hakim Purwantini, Naufal Afif, & Wahyu Anggit Prasetya. (2022). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 202–217. <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.202-217>
- Mahdi, S. A., & Darwis, H. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa dan whistleblowing system terhadap pencegahan fraud, dengan kecerdasan spiritual sebagai variabel moderasi (Studi pada aparat pemerintah desa Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 6(2), 184–198.
- Masni, E. P., & Sari, V. F. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Internal, dan Budaya Organisasi terhadap Kecurangan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(1), 263–277. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.729>
- Musmulyadi, M., & Sari, F. I. (2020). Whistleblowing System Dalam Memutus Rantai Fraud Untuk Mewujudkan Economic Growth (Studi Pada Direktorat Jenderal Pajak Indonesia). *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 292–303. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.198>
- Nurhidayat, I., & Kusumasari, B. (2018). Strengthening the effectiveness of

- whistleblowing system: A study for the implementation of anti-corruption policy in Indonesia. *Journal of Financial Crime, Volume 25*.
- Nurjanah, I. A., & Setiawan, M. A. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Individu dan Budaya Organisasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pemerintah Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 517–528. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i3.396>
- Nuswantara, D. A., Iriani, S. S., Purwoko, B., & Sujarwanto, S. (2022). E-Partisipasi untuk Meningkatkan Transparansi dan Akurasi Perhitungan BOSDA di Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Abdimas Madani Dan Lestari (JAMALI)*, 4(1), 45–56. <https://doi.org/10.20885/jamali.vol4.iss1.art6>
- Olivia, & Lastanti, H. S. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal, Independensi, Whistleblowing System, Anti-Fraud Awareness, Dan Integritas Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 261–272. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14217>
- Rodiah, S., Ardianni, I., & Herlina, A. (2019). Pengaruh pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, moralitas manajemen dan budaya organisasi terhadap kecurangan akuntansi. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, 9(1), 1–11.
- Schultz, D., & Harutyunyan, K. (2015). Combating corruption: The development of whistleblowing laws in the United States, Europe, and Armenia. *International Comparative Jurisprudence*, 1(2), 87–97. <https://doi.org/10.1016/j.icj.2015.12.005>
- Selvia, D. E., & Arza, F. I. (2023). Pengaruh Transparansi, Asimetri Informasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(3), 1206–1223. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.707>
- Utari, N. M. A. D., Sujana, E., & Yuniarta, A. (2019). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Moralitas Individu, Dan Whistleblowing Pada Lembaga Perkreditan Desa. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 10(2), 33–44.
- Widyawati, N. P. A., Sujana, E., & Yuniarta, G. A. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana BUMDES (Studi Empiris pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 10(3), 368–379. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/22806>
- Yanto, E., & Aqfir, A. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa. *Economy Deposit Journal (E-DJ)*, 2(2). <https://doi.org/10.36090/e-dj.v2i2.916>
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

## TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1. Average Variance Extracted (AVE)

	Average Variance Extracted (AVE)
Budaya Organisasi (X1)	0,77
Moderating Effect 1	1,00
Moderating Effect 2	1,00

Partisipasi Masyarakat (X2)	1,00
Pencegahan Fraud (Z)	0,91
Whistleblowing System (X2)	1,00

Tabel 2. Olah Data Outer Loading 1

	Budaya Organisasi	Moderating Effect 1	Moderating Effect 2	Partisipasi Masyarakat	Pencegahan Fraud	Whistleblowing System	Kesimpulan
BO1	0,925						Valid
BO2	0,879						Valid
BO3	0,698						Tidak Valid
BO4	0,775						Valid
BO5	0,01						Tidak Valid
Budaya Organisasi * Partisipasi Masyarakat		1,30					Valid
PF1					0,97		Valid
PF2					0,97		Valid
PF3					0,95		Valid
PF4					0,97		Valid
PF5					0,92		Valid
PM1				0,70			Valid
PM2				0,29			Tidak Valid
PM3				0,23			Tidak Valid
PM4				-0,64			Tidak Valid
WBS1						0,36	Tidak Valid
WBS2						0,92	Valid
WBS3						0,78	Valid
WBS4						0,69	Tidak Valid
Whistleblowing System * Partisipasi Masyarakat			0,864				Valid

Tabel 3. Olah Data Outer Loading 2

	Budaya Organisasi	Moderating Effect 1	Moderating Effect 2	Partisipasi Masyarakat	Pencegahan Fraud	Whistleblowing System	Kesimpulan
BO1	0.948						Valid
BO2	0.859						Valid
BO4	0.812						Valid
Budaya Organisasi * Partisipasi Masyarakat		0.97					Valid
PF1					0.97		Valid
PF2					0.97		Valid

PF3					0.95		Valid
PF4					0.97		Valid
PF5					0.92		Valid
PM1				1.00			Valid
WBS2						0.98	Valid
WBS3						0.68	Tidak Valid
Whistleblowing System * Partisipasi Masyarakat			0.92				Valid

Tabel 4. Olah Data Outer Loading 3

	Budaya Organisasi	Moderating Effect 1	Moderating Effect 2	Partisipasi Masyarakat	Pencegahan Fraud	Whistleblowing System	Kesimpulan
BO1	0,95						Valid
BO2	0,86						Valid
BO4	0,81						Valid
Budaya Organisasi * Partisipasi Masyarakat		0,97					Valid
PF1					0,97		Valid
PF2					0,97		Valid
PF3					0,95		Valid
PF4					0,97		Valid
PF5					0,92		Valid
PM1				1			Valid
WBS2						1	Valid
Whistleblowing System * Partisipasi Masyarakat			0,93				Valid

Tabel 5. Fornell-Larcker Criterion

	Budaya Organisasi	Moderating Effect 1	Moderating Effect 2	Partisipasi Masyarakat	Pencegahan Fraud	Whistleblowing System
Budaya Organisasi	0,87					
Moderating Effect 1	0,36	1,00				
Moderating Effect 2	0,10	0,77	1,00			
Partisipasi Masyarakat	-0,27	-0,09	-0,01	1,00		
Pencegahan Fraud	0,85	0,52	0,15	-0,36	0,96	
Whistleblowing System	0,64	0,10	-0,31	0,20	0,47	1,00

Tabel 6. Heteroit-Monotrait Ratio (HTMT)

	Budaya Organisasi	Moderating Effect 1	Moderating Effect 2	Partisipasi Masyarakat	Pencegahan Fraud	Whistleblowing System
Budaya Organisasi						

Moderating Effect 1	0,37					
Moderating Effect 2	0,10	0,77				
Partisipasi Masyarakat	0,27	0,09	0,01			
Pencegahan Fraud	0,92	0,52	0,15	0,36		
Whistleblowing System	0,70	0,10	0,31	0,20	0,47	

Tabel 7. Uji Reabilitas

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability
Budaya Organisasi	0,85	0,86	0,91
Moderating Effect 1	1,00	1,00	1,00
Moderating Effect 2	1,00	1,00	1,00
Partisipasi Masyarakat	1,00	1,00	1,00
Pencegahan Fraud	0,98	0,98	0,98
Whistleblowing System	1,00	1,00	1,00

Tabel 8. Path Koefisien

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
Budaya Organisasi -> Pencegahan Fraud	0,86	0,90	0,15	5,88	0,00
Moderating Effect 1 -> Pencegahan Fraud	0,63	0,67	0,16	3,88	0,00
Moderating Effect 2 -> Pencegahan Fraud	-0,54	-0,59	0,23	2,31	0,02
Partisipasi Masyarakat -> Pencegahan Fraud	-0,03	0,00	0,11	0,24	0,81
Whistleblowing System -> Pencegahan Fraud	-0,30	-0,34	0,20	1,44	0,15

Tabel 9. R-Square

	R Square	R Square Adjusted
Pencegahan Fraud	0,85	0,84

Tabel 10. F-Square

	Pencegahan Fraud
Budaya Organisasi	1,498
Moderating Effect 1	0,636
Moderating Effect 2	0,334
Partisipasi Masyarakat	0,002
Pencegahan Fraud	
Whistleblowing System	0,131